PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NELAYAN PESISIR MELALUI PROGRAM KOLAKA BAHARI DI DESA TANGGETADA KECAMATAN TANGGETADA KABUPATEN KOLAKA

Muh. Reza Rihlah Muhfadillah Tahir
NPP. 33.0970
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: rihlahreza18@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dwi Indah Kartika, S.Pd., M.Si.
Email:

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The coastal potential of Tanggetada Village is relatively large, but the welfare of traditional fishers remains low. The implementation of the Kolaka Bahari Program also still faces gaps between policy targets and village-level realization.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of the village government in coastal fishers economic development through the Kolaka Bahari Program in Tanggetada Village, Tanggetada District, Kolaka Regency.* ***Method:*** *This study used a descriptive qualitative method with Rasyid government role theory, covering development, regulation, empowerment, and service functions. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving seven informants selected by purposive sampling.* ***Result:*** *The results show that the village government has performed its role, but not optimally. The development function is visible in basic infrastructure and initial support for fishing gear, but fisheries-specific infrastructure such as cold storage and processing facilities is not yet available. The regulatory function is reflected in village meetings, but specific village regulations for coastal economic management have not been established. The empowerment function has begun through community involvement and BUMDes facilitation, yet fishers training and business mentoring remain limited. The service function is positive in administrative accessibility and friendliness, but has not expanded toward productive economic services for fishers.* ***Conclusion:*** *The role of the Tanggetada Village Government in the Kolaka Bahari Program has been implemented, but it requires stronger policy direction, fisheries infrastructure, institutional empowerment, and productive services to improve coastal fishers welfare sustainably.*

Keywords: *Coastal fishers; Kolaka Bahari; Local economic development; Village government role*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Desa Tanggetada memiliki potensi pesisir yang besar, tetapi kesejahteraan nelayan tradisional masih rendah. Pelaksanaan Program Kolaka Bahari juga masih menunjukkan kesenjangan antara target kebijakan dan realisasi di tingkat desa. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi nelayan pesisir melalui Program Kolaka Bahari di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori peran pemerintahan Rasyid yang meliputi fungsi pembangunan, pengaturan, pemberdayaan, dan pelayanan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposive sampling. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan perannya, tetapi belum optimal. Fungsi pembangunan terlihat melalui pembangunan dasar dan bantuan awal alat tangkap, namun infrastruktur khusus

perikanan seperti cold storage dan fasilitas pengolahan hasil laut belum tersedia. Fungsi pengaturan dilakukan melalui musyawarah desa, tetapi belum ada peraturan desa khusus pengelolaan ekonomi pesisir. Fungsi pemberdayaan mulai berjalan melalui pelibatan masyarakat dan fasilitasi BUMDes, namun pelatihan serta pendampingan usaha nelayan masih terbatas. Fungsi pelayanan cukup baik pada aspek administrasi dan keramahan, tetapi belum berkembang menjadi pelayanan ekonomi produktif bagi nelayan. **Kesimpulan:** Peran Pemerintah Desa Tanggetada dalam Program Kolaka Bahari sudah terlaksana, tetapi perlu penguatan kebijakan, infrastruktur perikanan, pemberdayaan kelembagaan, dan pelayanan produktif agar kesejahteraan nelayan meningkat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi pesisir; Kolaka Bahari; Nelayan; Pemerintah desa; Peran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ketergantungan yang kuat terhadap sektor kelautan dan perikanan. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pangan dan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi jutaan rumah tangga nelayan skala kecil. Meskipun demikian, studi tentang small-scale fisheries di Indonesia menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan masih menghadapi tingkat kemiskinan dan kerentanan yang tinggi akibat terbatasnya infrastruktur, lemahnya akses pasar, perubahan iklim, dan menurunnya kualitas ekosistem pesisir (Stacey et al., 2021; Handayati et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa potensi kelautan yang besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak didukung tata kelola lokal yang kuat.

Kemiskinan nelayan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya hasil tangkapan, tetapi juga oleh struktur ekonomi yang membuat posisi tawar nelayan lemah. Kusnadi (2009) menjelaskan bahwa persoalan nelayan berkaitan dengan keterbatasan modal, ketergantungan pada tengkulak, musim penangkapan, dan lemahnya kelembagaan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal, pemerintah desa memiliki peran strategis untuk menghubungkan potensi sumber daya lokal dengan kebijakan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat (Blakely & Leigh, 2013). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nelayan pesisir memerlukan kehadiran pemerintah desa sebagai penggerak kebijakan, fasilitator, dan pelayan masyarakat.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat (Republik Indonesia, 2014). Kewenangan tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 yang menegaskan perlunya pemberdayaan nelayan kecil secara terkoordinasi dan berkesinambungan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2021). Dalam konteks ini, desa bukan hanya pelaksana administrasi, tetapi juga subjek pembangunan yang dapat mengelola potensi lokal sesuai kebutuhan masyarakat.

Kajian dosen IPDN juga menegaskan pentingnya posisi desa dalam pembangunan. Nain (2017) menunjukkan bahwa hubungan pemerintah desa dan supradesa berpengaruh terhadap proses perencanaan serta penganggaran desa. Hamid (2018) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui proses penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses agar masyarakat mampu mengembangkan potensi dirinya. Sementara itu, Suaib (2023) menegaskan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan partisipasi, kepercayaan, komunikasi, dan akuntabilitas antar pemangku kepentingan. Ketiga pandangan tersebut relevan untuk menilai bagaimana Pemerintah Desa Tanggetada menjalankan peran dalam Program Kolaka Bahari.

Kabupaten Kolaka memiliki potensi perikanan yang besar, tetapi masyarakat pesisir masih menghadapi persoalan pendapatan, keterbatasan alat tangkap, dan rendahnya kapasitas pengolahan hasil laut. Data BPS Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah perdesaan dan pesisir masih menjadi persoalan penting yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah (Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, 2024). Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Kolaka meluncurkan Program Kolaka Bahari pada tahun 2024 untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, memperkuat kapasitas nelayan, membentuk kelompok usaha, dan memperluas akses permodalan melalui peran desa sebagai ujung tombak pelaksanaan program.

Tabel 1.
Perkembangan Program Kolaka Bahari Tahun 2024-2025

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Keterangan
Desa penerima program	12 desa	10 desa	17 desa	Bertahap per kecamatan pesisir
Nelayan yang dilatih	300 orang	287 orang	450 orang	Pelatihan pengolahan hasil laut
Kelompok usaha nelayan terbentuk	20 kelompok	18 kelompok	30 kelompok	Termasuk KUB dan koperasi
Nilai produksi olahan ikan	Rp1.200 juta	Rp1.085 juta	Rp2.000 juta	Meningkat dari produk mentah
Akses permodalan nelayan	60%	52%	75%	Melalui KUR dan dana desa
Peran desa dalam program	70%	65%	85%	Fasilitasi dan pendampingan desa

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka (2026), diolah penulis, 2026.

Desa Tanggetada merupakan salah satu desa pesisir di Kecamatan Tanggetada yang berada di kawasan perairan Teluk Bone. Profil Desa Tanggetada menunjukkan bahwa 277 dari 555 penduduk yang terdata menurut mata pencaharian bekerja sebagai nelayan, sehingga sektor perikanan menjadi sumber ekonomi utama desa (Pemerintah Desa Tanggetada, 2024). Namun, sebagian besar nelayan masih menggunakan perahu kecil dan alat tangkap sederhana dengan pendapatan yang belum stabil. Kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk meneliti peran pemerintah desa dalam mengoptimalkan Program Kolaka Bahari sebagai instrumen pembangunan ekonomi nelayan pesisir.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kesenjangan utama dalam penelitian ini terletak pada jarak antara potensi sumber daya pesisir, dukungan regulasi desa, dan implementasi program pemberdayaan ekonomi nelayan di lapangan. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola potensi lokal, tetapi di Desa Tanggetada belum semua kebutuhan ekonomi nelayan dapat dijawab melalui program pembangunan desa. Program Kolaka Bahari telah menargetkan pelatihan, kelompok usaha, akses permodalan, dan peningkatan nilai produksi, tetapi realisasi beberapa indikator masih belum mencapai target.

Dari sisi akademik, penelitian terdahulu banyak membahas kerentanan nelayan, pengembangan BUMDes, modal manusia, strategi adaptasi iklim, dan intervensi mata pencaharian nelayan. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program afirmatif

daerah untuk pembangunan ekonomi nelayan pesisir masih terbatas, terutama pada konteks Program Kolaka Bahari di Desa Tanggetada. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah dengan menilai peran pemerintah desa melalui fungsi pembangunan, pengaturan, pemberdayaan, dan pelayanan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena Program Kolaka Bahari masih berada pada tahap penguatan dan perluasan sasaran. Apabila peran pemerintah desa tidak dikaji secara empiris, pemerintah daerah dan desa akan kekurangan dasar untuk mengetahui bagian mana yang sudah berjalan, bagian mana yang belum optimal, dan dukungan apa yang dibutuhkan oleh nelayan. Kajian ini diharapkan memberikan masukan bagi perumusan kebijakan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan nelayan pesisir, terutama dalam penyediaan infrastruktur perikanan, pembentukan kelembagaan ekonomi, pelatihan, dan akses permodalan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian internasional bereputasi yang membahas nelayan skala kecil dan pembangunan pesisir. Handayati et al. (2025) meneliti kerentanan mata pencaharian nelayan skala kecil di Malang Selatan menggunakan livelihood vulnerability index dan menemukan bahwa strategi penghidupan serta variabilitas iklim menjadi komponen dengan kerentanan tinggi. Hadi et al. (2024) membahas keberlanjutan BUMDes pesisir melalui pendekatan Triple Bottom Line dan Interpretative Structural Modeling, dengan temuan bahwa penguatan regulasi, modal, dan komitmen pemerintah desa menjadi faktor penting dalam mengembangkan BUMDes pesisir. Abdullah et al. (2024) meneliti pemberdayaan nelayan di Kendari dan menemukan bahwa modal manusia serta kinerja kelompok usaha bersama berpengaruh positif terhadap pemberdayaan nelayan. Stacey et al. (2021) menelaah berbagai intervensi mata pencaharian nelayan skala kecil di Indonesia dan menekankan pentingnya pendekatan inklusif, partisipatif, serta kolaborasi dengan pemerintah lokal. Rahman et al. (2021) menunjukkan bahwa strategi adaptasi perubahan iklim, akses kredit, akses informasi iklim, dan keikutsertaan dalam kelompok nelayan berpengaruh terhadap pendapatan serta ketahanan pangan nelayan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap peran Pemerintah Desa Tanggetada dalam menerjemahkan Program Kolaka Bahari sebagai kebijakan pembangunan ekonomi pesisir di tingkat desa. Penelitian ini tidak hanya membahas kondisi nelayan atau program pemberdayaan secara umum, tetapi menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama yang dianalisis melalui empat fungsi pemerintahan menurut Rasyid (2010), yaitu fungsi pembangunan, pengaturan, pemberdayaan, dan pelayanan.

Dibandingkan dengan Handayati et al. (2025), penelitian ini memiliki perbedaan pada teori, metode, dan karakteristik objek penelitian. Handayati et al. (2025) mengkaji kerentanan mata pencaharian nelayan skala kecil di Malang Selatan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan livelihood vulnerability index, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program daerah di Desa Tanggetada. Penelitian ini juga berbeda dari Rahman et al. (2021) yang menilai pengaruh strategi adaptasi perubahan iklim terhadap pendapatan dan ketahanan pangan nelayan melalui model kuantitatif, karena penelitian ini tidak mengukur dampak adaptasi secara statistik, tetapi menjelaskan bagaimana pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan desa dapat mendukung ketahanan ekonomi nelayan.

Dibandingkan dengan Hadi et al. (2024), penelitian ini berbeda karena Hadi et al. (2024) berfokus pada keberlanjutan BUMDes pesisir melalui pendekatan Triple Bottom Line dan Interpretative Structural Modeling, sedangkan penelitian ini menempatkan BUMDes sebagai salah satu unsur dalam fungsi pemberdayaan pemerintah desa. Selanjutnya, dibandingkan dengan Abdullah et al. (2024), penelitian ini tidak menilai pengaruh modal manusia dan kinerja Kelompok Usaha Bersama secara kausal, melainkan menelaah keterbatasan pelatihan, pendampingan, dan kelembagaan ekonomi nelayan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemberdayaan desa.

Dibandingkan dengan Stacey et al. (2021), penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik. Stacey et al. (2021) mengkaji berbagai intervensi mata pencaharian nelayan skala kecil di Indonesia dengan kerangka penghidupan berkelanjutan, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada satu lokus desa pesisir, yaitu Desa Tanggetada, serta satu program daerah, yaitu Program Kolaka Bahari. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini juga terletak pada karakteristik objek penelitian yang lebih kontekstual, yaitu hubungan antara kebijakan daerah, kewenangan desa, dan kebutuhan ekonomi nelayan lokal.

Berdasarkan perbedaan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi pesisir diterjemahkan oleh pemerintah desa pada tingkat pelaksanaan. Kontribusi ini penting karena penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti kerentanan nelayan, adaptasi iklim, keberlanjutan BUMDes, kinerja kelompok usaha, atau program mata pencaharian secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menjelaskan peran pemerintah desa dalam Program Kolaka Bahari sebagai instrumen pembangunan ekonomi nelayan pesisir di Kabupaten Kolaka.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi nelayan pesisir melalui Program Kolaka Bahari di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan memahami secara mendalam proses, pengalaman, pandangan, dan peran para aktor dalam pelaksanaan Program Kolaka Bahari di Desa Tanggetada. Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna yang dibangun individu atau kelompok terhadap masalah sosial. Oleh karena itu, metode deskriptif digunakan agar data lapangan mengenai peran pemerintah desa dapat diuraikan secara sistematis, faktual, dan sesuai dengan konteks kehidupan nelayan pesisir.

Konsep utama penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi nelayan pesisir. Analisis dilakukan berdasarkan teori Rasyid (2010) yang memandang fungsi pemerintahan melalui empat dimensi, yaitu fungsi pembangunan, fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan. Teori ini digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menilai bagaimana pemerintah desa menyediakan dukungan pembangunan, merumuskan aturan, memperkuat kapasitas masyarakat, dan memberikan pelayanan kepada nelayan dalam pelaksanaan Program Kolaka Bahari.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan tersebut terdiri atas Kepala Desa Tanggetada, Sekretaris Desa Tanggetada, Kepala Seksi

Pelayanan Desa Tanggetada, Ketua Kelompok Nelayan, satu orang nelayan, dan dua tokoh masyarakat. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, kewenangan, dan keterlibatan langsung terhadap pemerintahan desa, kegiatan nelayan, serta pelaksanaan program pembangunan ekonomi pesisir (Sugiyono, 2019). Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan desa, profil desa, data program, laporan kegiatan, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nelayan pesisir.

Tabel 2.
Informan Penelitian

No.	Jabatan/Status Informan	Teknik Sampling	Jumlah
1	Kepala Desa Tanggetada	*Purposive sampling*	1 orang
2	Sekretaris Desa Tanggetada	*Purposive sampling*	1 orang
3	Kepala Seksi Pelayanan Desa Tanggetada	*Purposive sampling*	1 orang
4	Ketua Kelompok Nelayan Desa Tanggetada	*Purposive sampling*	1 orang
5	Nelayan Desa Tanggetada	*Purposive sampling*	1 orang
6	Tokoh Masyarakat Desa Tanggetada	*Purposive sampling*	2 orang
	Jumlah		**7 orang**

Sumber: Diolah penulis, 2026.

Jumlah informan sebanyak tujuh orang dipandang memadai dalam penelitian kualitatif karena penelitian ini menekankan kedalaman informasi, bukan jumlah responden. Kepala desa, sekretaris desa, dan kepala seksi pelayanan dipilih untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, pelayanan, dan pelaksanaan program desa. Ketua kelompok nelayan dan nelayan dipilih untuk menggambarkan kebutuhan serta pengalaman masyarakat pesisir. Tokoh masyarakat dipilih untuk memperkuat informasi mengenai partisipasi, komunikasi, dan respons masyarakat terhadap peran pemerintah desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan fungsi pembangunan, pengaturan, pemberdayaan, dan pelayanan pemerintah desa. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi sosial ekonomi nelayan, sarana penangkapan, infrastruktur perikanan, dan aktivitas pelayanan desa. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data melalui dokumen perencanaan, laporan kegiatan, foto kegiatan, data program, dan dokumen lain yang relevan dengan Program Kolaka Bahari.

Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagaimana dijelaskan Moleong (2019). Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan empat fungsi pemerintahan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel agar hubungan antara temuan lapangan dan indikator penelitian dapat terlihat jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian dilaksanakan di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, pada 31 oktober - 19 Januari tahun 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Pemerintah Desa Tanggetada dalam pembangunan ekonomi nelayan pesisir melalui Program Kolaka Bahari dengan menggunakan teori Rasyid (2010). Peran tersebut dilihat dari empat fungsi pemerintahan, yaitu fungsi pembangunan, pengaturan, pemberdayaan, dan pelayanan. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan karena pembangunan ekonomi nelayan tidak hanya membutuhkan bantuan fisik, tetapi juga regulasi, penguatan kapasitas, dan pelayanan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi produktif.

3.1. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan menunjukkan sejauh mana pemerintah desa mampu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks Desa Tanggetada, fungsi pembangunan diukur melalui pembangunan infrastruktur perikanan dan peningkatan sarana alat tangkap nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan pembangunan dasar seperti perbaikan jalan lingkungan, penyediaan fasilitas umum, dan dukungan terhadap kebutuhan umum masyarakat. Sekretaris Desa Tanggetada menyampaikan bahwa pembangunan selama ini lebih banyak difokuskan pada kebutuhan umum masyarakat, terutama akses dan mobilitas warga.

Meskipun demikian, jika dikaitkan dengan kebutuhan nelayan, pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh infrastruktur perikanan. Ketua kelompok nelayan menyampaikan bahwa fasilitas khusus seperti tempat penyimpanan ikan, fasilitas pengolahan hasil laut, dan sarana pendaratan ikan belum tersedia secara memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pembangunan sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan rantai ekonomi perikanan. Temuan ini sejalan dengan Stacey et al. (2021) yang menegaskan bahwa intervensi mata pencaharian nelayan memerlukan infrastruktur, pendampingan, dan dukungan kelembagaan yang berlangsung dalam jangka waktu memadai.

Pada indikator peningkatan sarana alat tangkap, pemerintah desa telah menunjukkan perhatian melalui bantuan dasar bagi nelayan. Salah satu nelayan menyampaikan bahwa bantuan alat tangkap memang sudah mulai diperhatikan meskipun belum semua kebutuhan terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya langkah awal yang positif, tetapi belum merata dan belum berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan desa, Nain (2017) menekankan pentingnya hubungan perencanaan dan penganggaran desa agar kebutuhan lokal dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat. Dengan demikian, fungsi pembangunan di Desa Tanggetada perlu diarahkan lebih kuat pada kebutuhan spesifik nelayan, seperti alat tangkap, tempat penyimpanan, pengolahan hasil laut, dan akses pasar.

3.2. Fungsi Pengaturan

Fungsi pengaturan berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa merumuskan kebijakan, aturan, dan mekanisme pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tanggetada telah membuka ruang partisipasi melalui musyawarah desa. Tokoh masyarakat menyampaikan bahwa setiap program desa dibahas terlebih dahulu melalui musyawarah sehingga masyarakat dapat menyampaikan usulan. Mekanisme ini memperlihatkan adanya proses partisipatif dalam pengambilan keputusan desa.

Namun, fungsi pengaturan belum optimal karena belum tersedia Peraturan Desa yang secara khusus mengatur pengelolaan ekonomi pesisir atau penguatan nelayan dalam Program Kolaka Bahari. Kepala Desa Tanggetada menyampaikan bahwa aturan khusus untuk mendukung ekonomi nelayan belum banyak dan masih bersifat umum. Sekretaris desa juga menegaskan bahwa program dan aturan desa belum betul-betul mengarah pada pengembangan potensi nelayan. Dengan demikian, fungsi pengaturan sudah hadir melalui musyawarah, tetapi belum kuat secara substansial sebagai instrumen kebijakan ekonomi pesisir.

Kondisi ini penting karena pengaturan desa menjadi dasar bagi alokasi anggaran, pembentukan kelembagaan, pengelolaan BUMDes, serta kerja sama dengan dinas terkait. Hadi et al. (2024) menemukan bahwa penguatan anggaran, diversifikasi unit usaha, dan aturan kelembagaan BUMDes merupakan bagian penting dalam strategi pengembangan ekonomi pesisir. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Tanggetada perlu menyusun regulasi desa yang lebih spesifik agar Program Kolaka Bahari tidak

hanya menjadi program daerah, tetapi juga menjadi agenda pembangunan desa yang memiliki dasar perencanaan dan penganggaran yang jelas.

3.3. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan menjadi unsur penting karena pembangunan ekonomi nelayan tidak dapat hanya mengandalkan bantuan fisik. Pemberdayaan harus meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi. Hamid (2018) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat mencakup proses memberikan daya, akses, dan kemampuan agar masyarakat mampu mengambil keputusan serta mengembangkan kehidupannya. Dalam penelitian ini, fungsi pemberdayaan dilihat dari pelatihan peningkatan kapasitas nelayan dan pembinaan BUMDes untuk nelayan pesisir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tanggetada telah berupaya melibatkan masyarakat dalam kegiatan desa. Kepala desa menyampaikan bahwa pemerintah desa berusaha mengajak masyarakat agar lebih aktif dalam berbagai kegiatan. Akan tetapi, pelatihan yang secara khusus diarahkan pada kebutuhan nelayan belum banyak dilakukan. Ketua kelompok nelayan menyatakan bahwa pelatihan atau pendampingan khusus bagi nelayan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masih bersifat umum dan belum terprogram secara khusus untuk meningkatkan kapasitas ekonomi nelayan.

Temuan tersebut sejalan dengan Abdullah et al. (2024) yang menegaskan bahwa modal manusia dan kinerja kelompok usaha bersama berpengaruh positif terhadap pemberdayaan nelayan. Artinya, nelayan membutuhkan pelatihan pengolahan hasil laut, manajemen usaha, akses permodalan, pemasaran, dan penguatan kelompok. Suaib (2023) juga menekankan bahwa pemberdayaan membutuhkan partisipasi, kepercayaan, komunikasi, dan akuntabilitas. Dalam konteks Tanggetada, pelatihan dan pendampingan perlu disusun secara berkala agar nelayan tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu mengelola usaha secara mandiri.

Pada aspek pembinaan BUMDes, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah menyadari pentingnya BUMDes sebagai fasilitator ekonomi desa, tetapi perannya belum optimal. Kepala Desa Tanggetada menyampaikan bahwa BUMDes telah difasilitasi untuk mendukung usaha desa dan kerja sama dengan dinas terkait, namun belum berjalan maksimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa BUMDes belum sepenuhnya menjadi lembaga ekonomi yang dapat membantu nelayan dalam permodalan, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran hasil tangkapan.

3.4. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan yang mudah, ramah, dan responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administratif di Desa Tanggetada relatif mudah diakses dan dilaksanakan dengan sikap yang ramah. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator pelayanan dasar sudah terpenuhi. Pemerintah desa telah hadir dalam membantu masyarakat mengurus surat menyurat dan keperluan administrasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Namun, apabila dilihat dari kebutuhan ekonomi nelayan, pelayanan desa belum berkembang menjadi pelayanan ekonomi produktif. Layanan yang diberikan masih berfokus pada administrasi, sedangkan fasilitasi akses permodalan, pendampingan proposal bantuan, penghubung dengan pasar, dan layanan informasi program belum optimal. Padahal, Rahman et al. (2021) menemukan bahwa akses kredit, informasi iklim, dan keikutsertaan dalam kelompok nelayan memengaruhi strategi

adaptasi dan pendapatan nelayan. Oleh karena itu, fungsi pelayanan pemerintah desa perlu diperluas dari layanan administratif menuju layanan yang mendukung produktivitas ekonomi nelayan.

Tabel 3.
Ringkasan Temuan Peran Pemerintah Desa Tanggetada

Dimensi	Temuan Utama	Keterangan
Pembangunan	Pembangunan dasar berjalan, bantuan alat tangkap mulai diberikan, tetapi infrastruktur perikanan khusus belum tersedia.	Belum optimal
Pengaturan	Musyawarah desa dilakukan, tetapi belum ada peraturan desa khusus ekonomi pesisir dan nelayan.	Belum optimal
Pemberdayaan	Pelibatan masyarakat dan fasilitasi BUMDes mulai dilakukan, tetapi pelatihan dan pendampingan nelayan masih terbatas.	Belum optimal
Pelayanan	Pelayanan administrasi mudah dan ramah, tetapi belum berkembang menjadi pelayanan ekonomi produktif bagi nelayan.	Cukup baik tetapi perlu diperluas

Sumber: Diolah penulis, 2026.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Tanggetada dalam Program Kolaka Bahari telah berjalan, tetapi belum optimal dalam menjawab kebutuhan ekonomi nelayan pesisir. Temuan ini penting karena memperlihatkan adanya perbedaan antara peran normatif pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan lokal dengan peran aktual yang masih terbatas pada pembangunan dasar, musyawarah desa, pelibatan masyarakat, dan pelayanan administratif. Dengan menggunakan teori Rasyid (2010), penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nelayan membutuhkan keterpaduan fungsi pembangunan, pengaturan, pemberdayaan, dan pelayanan, bukan hanya bantuan fisik atau kegiatan administratif.

Temuan tersebut sama halnya dengan Stacey et al. (2021) yang menekankan bahwa keberhasilan intervensi mata pencaharian nelayan skala kecil membutuhkan pendekatan inklusif, partisipatif, pendampingan yang memadai, serta kolaborasi dengan pemerintah lokal. Di Desa Tanggetada, pemerintah desa telah membuka ruang partisipasi melalui musyawarah desa, tetapi partisipasi tersebut belum cukup kuat karena belum diikuti regulasi khusus, pendampingan usaha, dan penguatan kelembagaan ekonomi nelayan. Perbedaannya, Stacey et al. (2021) mengkaji dua puluh program mata pencaharian nelayan di berbagai wilayah Indonesia dengan kerangka penghidupan berkelanjutan, sedangkan penelitian ini mengkaji satu program daerah secara lebih mendalam pada satu desa pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya temuan Stacey et al. (2021) dengan menunjukkan bahwa keberhasilan program penghidupan nelayan sangat ditentukan oleh kapasitas desa sebagai pelaksana kebijakan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Temuan ini juga memperkuat penelitian Handayati et al. (2025) yang menunjukkan bahwa nelayan skala kecil rentan pada aspek strategi penghidupan serta variabilitas iklim dan bencana alam. Di Desa Tanggetada, kerentanan tersebut tampak melalui ketergantungan nelayan terhadap cuaca, penggunaan alat tangkap sederhana, belum tersedianya fasilitas penyimpanan ikan, dan terbatasnya pengolahan hasil laut. Akan tetapi, penelitian ini berbeda dari Handayati et al. (2025) karena tidak mengukur tingkat kerentanan melalui indeks kuantitatif, melainkan menjelaskan bagaimana peran pemerintah desa dapat mengurangi kerentanan tersebut melalui infrastruktur perikanan, regulasi, pelatihan, dan pelayanan produktif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperlihatkan bahwa nelayan rentan, tetapi juga menunjukkan bagian mana dari fungsi pemerintah desa yang perlu diperkuat agar kerentanan ekonomi nelayan dapat dikurangi.

Pada aspek kelembagaan ekonomi, temuan penelitian ini sejalan sekaligus berbeda dengan Hadi et al. (2024). Hadi et al. (2024) menunjukkan bahwa keberlanjutan BUMDes pesisir membutuhkan penguatan modal, komitmen pemerintah desa, diversifikasi unit usaha, dan penguatan peraturan desa. Temuan di Desa Tanggetada memperkuat pandangan tersebut karena BUMDes belum mampu menjadi penggerak ekonomi nelayan akibat belum optimalnya unit usaha, permodalan, pengelolaan, dan dukungan regulasi. Namun, temuan ini tidak sepenuhnya sama dengan Hadi et al. (2024) karena penelitian tersebut menilai keberlanjutan BUMDes dengan pendekatan Triple Bottom Line dan Interpretative Structural Modeling, sedangkan penelitian ini menempatkan BUMDes sebagai bagian dari fungsi pemberdayaan pemerintah desa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan BUMDes di Desa Tanggetada bukan hanya persoalan keberlanjutan kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan belum kuatnya peran pemerintah desa dalam mengarahkan BUMDes agar terhubung langsung dengan kebutuhan nelayan.

Temuan mengenai terbatasnya pelatihan dan pendampingan nelayan memperkuat penelitian Abdullah et al. (2024) yang menyatakan bahwa modal manusia dan kinerja Kelompok Usaha Bersama berpengaruh positif terhadap pemberdayaan nelayan. Di Desa Tanggetada, pelatihan nelayan belum dilakukan secara rutin, pendampingan usaha masih terbatas, dan kelompok nelayan belum sepenuhnya menjadi wadah peningkatan kapasitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak cukup dilakukan melalui ajakan partisipasi, tetapi perlu diwujudkan melalui peningkatan keterampilan, manajemen usaha, akses permodalan, pemasaran, dan penguatan kelompok. Perbedaannya, Abdullah et al. (2024) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis Partial Least Square untuk menguji hubungan antarvariabel, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan bagaimana keterbatasan pelatihan dan kelembagaan muncul dalam pelaksanaan peran pemerintah desa. Dengan demikian, penelitian ini memberi penjelasan kontekstual mengenai mengapa peningkatan modal manusia nelayan sulit berjalan apabila pemerintah desa belum memiliki program pemberdayaan yang terstruktur.

Temuan pada fungsi pelayanan juga memperkuat Rahman et al. (2021) yang menunjukkan bahwa akses kredit, akses informasi iklim, dan keikutsertaan dalam kelompok nelayan berpengaruh terhadap strategi adaptasi, pendapatan, dan ketahanan pangan nelayan. Di Desa Tanggetada, pelayanan administrasi sudah mudah diakses, tetapi pelayanan ekonomi produktif belum berkembang secara optimal. Pemerintah desa belum sepenuhnya menjadi penghubung nelayan dengan akses pembiayaan, informasi pasar, informasi program, dan pendampingan proposal bantuan. Perbedaannya, Rahman et al. (2021) menilai dampak strategi adaptasi perubahan iklim terhadap pendapatan dan ketahanan pangan secara kuantitatif, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa prasyarat adaptasi tersebut belum sepenuhnya difasilitasi oleh pelayanan desa. Dengan kata lain, penelitian ini tidak mengukur dampak adaptasi, tetapi menjelaskan peran pelayanan desa yang seharusnya dapat membuka akses nelayan terhadap kredit, informasi, dan kelompok usaha.

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa penelitian ini memperkuat beberapa penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan perbedaan yang jelas pada sisi teori, metode, kebijakan, dan karakteristik objek penelitian. Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pengakuan bahwa nelayan kecil menghadapi kerentanan, keterbatasan kapasitas, lemahnya kelembagaan, dan kebutuhan terhadap dukungan pemerintah lokal. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang menempatkan Pemerintah Desa Tanggetada sebagai aktor pelaksana Program Kolaka Bahari dan menganalisisnya melalui fungsi pembangunan, pengaturan, pemberdayaan, dan pelayanan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memberikan kontribusi bahwa keberhasilan program pembangunan ekonomi pesisir tidak hanya bergantung pada keberadaan program daerah, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa menerjemahkan program tersebut ke dalam regulasi desa, infrastruktur perikanan, penguatan BUMDes, pelatihan nelayan, akses permodalan, dan pelayanan ekonomi produktif.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan beberapa faktor pendukung peran pemerintah desa, yaitu letak geografis Desa Tanggetada sebagai wilayah pesisir, dominannya mata pencaharian sebagai nelayan, semangat gotong royong masyarakat, dan komunikasi yang relatif terbuka antara pemerintah desa dengan masyarakat. Faktor tersebut menjadi modal sosial yang dapat memperkuat Program Kolaka Bahari apabila dikelola secara konsisten melalui perencanaan partisipatif dan penguatan kelembagaan.

Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan peran pemerintah desa. Hambatan tersebut meliputi ketergantungan nelayan terhadap cuaca, keterbatasan infrastruktur perikanan, minimnya pelatihan dan pendampingan, lemahnya peran BUMDes, serta keterbatasan anggaran desa. Hambatan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi pesisir tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah desa, melainkan membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah, dinas teknis, lembaga keuangan, dan kelompok nelayan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tanggetada telah menjalankan peran dalam pembangunan ekonomi nelayan pesisir melalui Program Kolaka Bahari, tetapi belum optimal. Fungsi pembangunan terlihat melalui pembangunan dasar dan bantuan awal alat tangkap, tetapi belum menyentuh infrastruktur perikanan khusus. Fungsi pengaturan telah berjalan melalui musyawarah desa, tetapi belum didukung peraturan desa khusus ekonomi pesisir. Fungsi pemberdayaan mulai dilakukan melalui pelibatan masyarakat dan fasilitasi BUMDes, namun pelatihan serta pendampingan nelayan masih terbatas. Fungsi pelayanan sudah baik pada aspek administrasi, tetapi belum berkembang menjadi pelayanan ekonomi produktif. Oleh karena itu, Program Kolaka Bahari perlu diperkuat melalui regulasi desa, infrastruktur perikanan, penguatan BUMDes, pelatihan nelayan, akses permodalan, dan pelayanan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi nelayan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya berfokus pada satu desa, sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan seluruh kondisi desa pesisir di Kabupaten Kolaka. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan lebih menekankan kedalaman informasi daripada pengukuran kuantitatif dampak program.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work)*. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas Program Kolaka Bahari secara kuantitatif dengan mengukur perubahan pendapatan, akses pasar, kapasitas kelompok nelayan, dan keberlanjutan BUMDes pada beberapa desa pesisir penerima program.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Tanggetada, kelompok nelayan, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S., Iswandi, R. M., Rela, I. Z., & Hamzah, A. (2024). Fishermen empowerment: The key role of human capital and joint business group performance in improving welfare in Kendari City, Indonesia. *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences, 12*(3), 791–802. https://doi.org/10.22194/JGIAS/24.1370

Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara. (2024). *Profil kemiskinan di Sulawesi Tenggara September 2024*. https://sultra.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/1186/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-10-63-persen-.html

Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2013). *Planning local economic development: Theory and practice* (5th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka. (2026). *Data perkembangan Program Kolaka Bahari tahun 2024–2025*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka.

Hadi, S., Soetriono, S., Subekti, S., Aji, J. M. M., & Rizal, N. S. (2024). Sustainability and strategy for development of the village-owned enterprise (BUMDes) concept for coastal communities through Triple Bottom Line and Interpretative Structural Modeling. *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences, 12*(4), 1059–1069. https://doi.org/10.22194/JGIAS/24.1394

Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat*. De La Macca.

Handayati, P., Nasih, A. M., Susilowati, I., Idris, I., Nayak, P. K., & Narmaditya, B. S. (2025). From vulnerable to resilience: An assessment of small-scale fisheries livelihood in South Malang of Indonesia. *Discover Sustainability, 6*, Article 17. https://doi.org/10.1007/s43621-025-00810-z

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil*.

Kusnadi. (2009). *Akar kemiskinan nelayan*. LKiS.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cetakan ke-40). PT Remaja Rosdakarya.

Nain, U. (2017). *Relasi pemerintah desa dan supradesa dalam perencanaan dan penganggaran desa*. Pustaka Pelajar. http://eprints.ipdn.ac.id/230/

Pemerintah Desa Tanggetada. (2024). *Profil Desa Tanggetada tahun 2024*. Pemerintah Desa Tanggetada.

Rahman, M. S., Toiba, H., & Huang, W.-C. (2021). The impact of climate change adaptation strategies on income and food security: Empirical evidence from small-scale fishers in Indonesia. *Sustainability, 13*(14), Article 7905. https://doi.org/10.3390/su13147905

Rasyid, M. R. (2010). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., Steenbergen, D. J., & Fitriana, R. (2021). Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends, enabling and constraining factors, and future opportunities. *Marine Policy, 132*, Article 104654. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654

Suaib. (2023). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Penerbit Adab.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.